

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA



2021



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA



2021

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA 2021

ISBN	:
No Publikasi	: 71000.2237
Katalog BPS	: 4601008.71
Ukuran Buku	: A4
Jumlah Halaman	: x + 28 halaman
Naskah	: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Gambar Kulit	: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Penyunting	: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Diterbitkan Oleh	: @BPS Provinsi Sulawesi Utara
Dicetak oleh	: CV. Rempah
Sumber Gambar	: <i>freepik, pngtree, pinterest</i>

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

**TIM PENYUSUN
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
PROVINSI SULAWESI UTARA 2021**

Pengarah

Asim Saputra

Penanggung Jawab

Titien Kristiningsih

Editor

Nova Nurviana

Naskah

Dina Atika Rahmawati

Infografis

Dina Atika Rahmawati

Tata Letak *Layout*

Dina Atika Rahmawati

Pembuat Tabel dan Gambar

Dina Atika Rahmawati

KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara 2021 berisi data dan informasi terpilih seputar aspek, variabel, dan indikator penyusun angka Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara yang dihitung menggunakan metode baru. Publikasi ini berisi analisis sederhana untuk membantu penggunaan data memahami perkembangan demokrasi di Sulawesi Utara.

Materi yang disajikan dalam publikasi ini memuat hal-hal yang terkait dengan aspek, variabel dan indikator indeks demokrasi. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara.

Kritik dan saran konstruktif berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Manado, November 2022

Kepala



Asim Saputra, SST, M. Ec.Dev

DAFTAR ISI

Tim Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara 2021	iii
Kata Sambutan	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
1. Urgensi Revisi Indeks Demokrasi Indonesia	1
2. Metodologi	3
3. Indeks Demokrasi Indonesia	7
4. Indeks Demokrasi Sulawesi Utara Tahun 2021	11
5. Penutup	19
6. Lampiran	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru	8
Gambar 2. Indeks Demkokrasi Indonesia Menurut Provinsi	12
Gambar 3. Aspek Indeks Demokrasi Sulawesi Utara Tahun 2021	14
Gambar 4. Indikator Indeks Demokrasi Sulawesi Utara Tahun 2021	15

<https://sulut.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Indikator	22
Tabel 2. Skor Indikator IDI Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.....	27

<https://sulut.bps.go.id>

URGENSI REVISI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN2010 – 2014, 2015 – 2019, serta 2021–2024. IDI merupakan kerja bersama beberapa instansi pemerintah yaitu Kemenkopolkumham, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah. Angka IDI pertama kali dikeluarkan BPS adalah IDI 2009. Pada publikasi ini, IDI terbaru yang ditampilkan adalah IDI 2021. Selama 12 tahun perhitungan, dijumpai beberapa indikator tidak lagi relevan sehingga perlu perbaikan. Selain itu saran dan masukan juga diperoleh dari berbagai kalangan. Sekalipun demikian, perubahan tidak serta-merta dapat dilakukan, agar indeks yang diperoleh bisa dibandingkan. Oleh karena itu diperlukan proses yang tidak sederhana untuk melakukan kajian revisi, agar hasilnya bisa lebih baik dari metode yang ada.

Pada tahun, 2018 revisi IDI yang dilakukan Bappenas merupakan hasil kolaborasi tiga lembaga riset, yaitu Cakra Wikara Indonesia (CWI), SMERU *Research Institute*, dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina. Kolaborasi tersebut telah menghasilkan Laporan Akhir: Revisi Indeks Demokrasi Indonesia. Kajian ini dilaksanakan dalam tiga fase, pertama kajian literatur (Mei-Juli 2018), kedua operasionalisasi konsep (Agustus-September 2018), dan terakhir uji coba (September-November 2018). Laporan akhir disusun hingga akhir 2018 yang secara komprehensif memasukkan segala aspek penting yang dapat menjadi acuan revisi IDI metode baru, yaitu perubahan teori, usulan indikator, hingga cara penghitungan. Uji coba pengumpulan data dilakukan pada empat wilayah yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, Maluku, dan DKI Jakarta.

Urgensi revisi IDI berdasarkan kajian tersebut paling kurang memuat empat hal. Pertama, IDI perlu memiliki basis teoretik dan konseptual yang kuat dalam memaknai demokrasi sesuai konteks Indonesia. Basis teoretik dan konseptual tersebut diharapkan mampu dioperasionalkan untuk memberikan arah bagi pembangunan politik dan arah perubahan demokrasi di Indonesia. Untuk itu IDI perlu memiliki ukuran-ukuran kebaikan demokrasi yang dituju sehingga tujuan dan arah perubahan yang diharapkan menjadi jelas dan terukur. IDI tidak hanya sekadar instrumen pengukuran dan penilaian demokrasi Indonesia, tetapi juga harus didorong sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kedua, perlunya melakukan pengukuran di tingkat pusat bukan hanya tingkat provinsi untuk menjamin Indeks Demokrasi Indonesia yang komprehensif. IDI saat ini hanya mengukur unit analisis di tingkat provinsi, sementara hasil skor nasional adalah hasil agregasi dari skor provinsi. Hal ini cukup problematik karena tidak dilakukannya pengumpulan data berbagai indikator tingkat pusat untuk menghasilkan skor di tingkat pusat.

Ketiga, konsep demokrasi dalam IDI saat ini masih dipahami terbatas pada dimensi politik. Sementara konteks demokrasi berdasarkan pengalaman negara-negara pasca-otoritarianisme seperti halnya Indonesia, perlu melihat demokrasi dalam berbagai dimensi yang lebih luas, termasuk ekonomi dan sosial masyarakat. Ketimpangan akses dan distribusi sumber daya ekonomi juga merupakan problem demokrasi, begitu pun juga hadir dan bekerjanya kekuatan oligarki dalam sistem politik dan ekonomi di Indonesia adalah hambatan bagi demokrasi karena adanya monopoli dan konsentrasi sumber daya.


Keempat, diperlukan studi perbandingan dengan berbagai indeks dan pengukuran demokrasi yang ada, memetakan berbagai indeks-indeks demokrasi sebagai referensi dan pembanding. Seluruh hal yang menjadi urgensi revisi tersebut telah dirancang pada hasil kajian yang dihasilkan konsorsium lembaga riset tersebut. Oleh karenanya, naskah akademik ini akan menggunakan hasil tersebut sebagai rujukan utama, sekaligus fokus untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasinya. Kondisi ini merupakan keniscayaan mengingat konsorsium hanya memiliki waktu kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dari Mei – Desember 2018 untuk menyelesaikan kajian. Oleh karenanya berbagai hal teknis seperti pemeriksaan ketersediaan data indikator, penyiapan instrumen, serta teknis penghitungan belum dieksplorasi terlalu mendalam.

METODOLOGI

Metode penghitungan IDI tetap menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Pendekatan ini bermanfaat bagi ilmuwan sosial untuk memperlihatkan kepercayaan yang lebih besar pada temuan mereka Webb et al (dalam Bryman,1988:130). Data kuantitatif dikumpulkan melalui penelusuran kejadian di koran cetak serta portal berita online, data sekunder, serta indeks yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Data tersebut divalidasi dalam FGD yang melibatkan ahli yang relevan. Dalam FGD ada tiga hal utama yang menjadi tujuan, yaitu konfirmasi, klarifikasi (koreksi), serta eksplorasi data baru yang belum tercakup dalam data kuantitatif. Validasi silang juga akan dilakukan pada data-data yang ada di FGD dengan menggunakan data kuantitatif yang tersedia. FGD akan dipimpin oleh fasilitator yang merupakan Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi. Peserta FGD merupakan perwakilan pemerintah, aparat keamanan, universitas, pers, tokoh masyarakat, serta LSM

1. Review surat kabar dan review dokumen

Review surat kabar dan dokumen dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik surat kabar maupun dokumen dianggap sabagai sumber informasi paling realistik untuk mendapatkan data *kuantitatif* (dalam kurun waktu pengamatan selama satu tahun) berkaitan dengan 3 aspek, 3 dimensi, dan 22 indikator IDI 2021. Penggunaan dokumen sebagai sumber data IDI tidak menuntut banyak penjelasan karena pada dasarnya, dokumen resmi merupakan sumber data yang layak dan biasa dipakai dalam banyak penelitian. Penggunaan media, khususnya surat kabar, sebagai sumber data untuk mengukur demokrasi mungkin tidak lazim digunakan, sebab itu perlu mendapatkan penjelasan khusus. IDI berpendapat, surat kabarlah yang merekam



kehidupan daerah, termasuk di dalamnya denyut demokrasi selama satu tahun secara terus menerus dari hari ke hari. Bukan berarti surat kabar tidak memiliki kelemahan. IDI sepenuhnya menyadari keterbatasan surat kabar seperti kemungkinan bias-bias editorial dan wartawan, keterbatasan jangkauan liputan, keterbatasan ruang, dan keterbatasan keahlian wartawan. Namun, disamping keterbatasan tersebut, surat kabar yang dipilih adalah surat kabar yang bebas dan merupakan sumber data mengenai demokrasi provinsi yang cukup baik, terlebih dalam hal yang berkaitan dengan gairah spontan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik di daerah.

Dalam konteks penyusunan IDI, persyaratan yang pertama merujuk pada 3 aspek, 3 dimensi, dan 22 indikator IDI. Sedangkan untuk memenuhi syarat yang kedua, ditetapkan media surat kabar, dan untuk ini telah dipilih satu surat kabar, yakni surat kabar lokal dengan oplah tertinggi. Provinsi Sulawesi Utara menggunakan surat kabar Manado Post. Sementara untuk *review* dokumen, yang digunakan adalah semua dokumen resmi (tertulis) yang masih berlaku dan terkait dengan indikator IDI dalam rentang waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Dokumen dapat berupa catatan, laporan, *press release*, Perda, surat edaran, maupun surat keputusan serta dokumen-dokumen resmi lainnya seperti data demonstrasi dari Kepolisian, dan data pemilih yang dikeluarkan oleh KPUD.


2. Focus Group Discussion (FGD) IDI

Focus Group Discussion (FGD) dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan data dan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok (Irwanto, 1998:1). Secara umum, tujuan utama dari penggunaan FGD adalah untuk menjangring data *kualitatif* berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Secara khusus, tujuan FGD dalam pengumpulan data IDI adalah untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian

partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data kuantitatif berkaitan dengan indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui *review* media dan dokumen. Tujuan selanjutnya, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. Terakhir, menggali informasi (data *kualitatif*) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui *review* media dan *review* dokumen.

Tahun 2021 penghitungan IDI menggunakan metode baru. IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks, yaitu indeks demokrasi di tingkat provinsi, indeks demokrasi di tingkat pusat, dan indeks demokrasi di tingkat nasional sebagai gabungan dari nilai provinsi dan pusat. Penghitungan secara umum dapat diformulasikan sebagai berikut: $IDI \text{ nasional} = 0,67 \text{ IDI provinsi} + 0,33 \text{ IDI pusat}$. IDI provinsi dan pusat dihitung dengan penimbang terhadap aspek dan indikator. Penimbang didapatkan dari metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas Saaty merupakan salah satu metode pembobotan dengan pendekatan untuk menentukan prioritas (untuk menjawab pertanyaan indikator mana yang lebih penting antara satu dengan yang lain). AHP sepenuhnya mengandalkan penilaian ahli dengan mengandalkan kapabilitas, pengalaman, pengetahuan, intuisi, dan kepercayaan ahli.

Pemilihan ahli sangat krusial karena ketika salah pengidentifikasian ahli, hasilnya mungkin akan tidak sesuai. Ahli tidak sebatas pengertian akademisi saja, tetapi ahli adalah orang atau pihak yang paham persis tentang subjek/substansi penelitian. Ahli sebaiknya terdiri dari yang memiliki *teoritical* dan *empirical background*. Namun, diusahakan yang perspektifnya bervariasi. Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) IDI Metode Baru dilakukan secara daring pada tanggal 3 September 2021 dengan mengundang 20 juri ahli untuk memberikan skor kepada setiap indikator dan aspek.



Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0–100. Dalam skala ini, 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0-100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “tinggi” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “rendah” (indeks < 60).

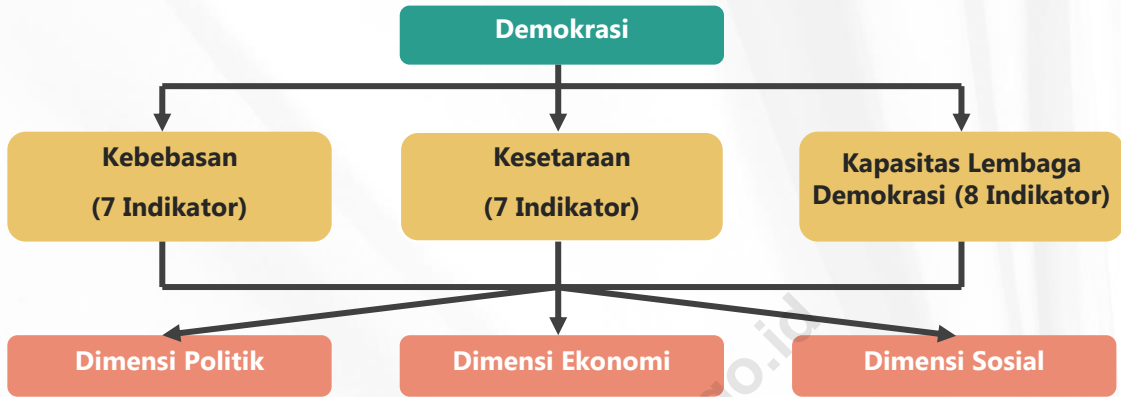
<https://sulut.bps.go.id>

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Demonopolisasi, sebagaimana diuraikan di atas, merupakan konsep dasar dalam riset indeks demokrasi Indonesia (IDI) metode baru yang mencakup tiga ranah yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Untuk mengukur perkembangan demokrasi maka demonopolisasi dioperasionalkan ke dalam dua aspek yaitu kebebasan (*liberalization*) dan kesetaraan (*equalization*). Dalam perspektif demonopolisasi, aspek kebebasan diartikan sebagai sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama, kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Sedangkan aspek kesetaraan, diartikan sebagai proses sejauh mana kelompok minoritas (yang mengalami diskriminasi dan eksklusi) secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor, dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Selain dua aspek tersebut, demonopolisasi juga dilihat dari aspek kapasitas lembaga demokrasi yaitu sejauh mana lembaga-lembaga demokrasi menginternalisasikan secara prosedural dan substantif upaya-upaya yang menjamin kebebasan dan kesetaraan.

Jumlah indikator demokrasi yang ditawarkan ada 22 indikator, terdiri dari 7 indikator aspek kebebasan, 7 indikator aspek kesetaraan, dan 8 indikator aspek kapasitas lembaga demokrasi. Seluruh indikator meliputi ranah politik, ekonomi, dan sosial, guna mengukur demonopolisasi pada ketiga ranah tersebut.

Gambar 1. Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru



1. Aspek Kebebasan

Demonopolisasi politik adalah proses penyebaran kekuasaan politik yang ditandai oleh terjaminnya kebebasan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Pada aspek ini ketiga dimensi itu diukur melalui 7 (tujuh) indikator. Dimensi politik diukur melalui 4 (empat) indikator, ekonomi dan sosial masing-masing satu indikator. Satu indikator lainnya mencakup ketiga dimensi tersebut, yaitu tentang kebebasan pers.

Aspek kebebasan mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri. Indikator pembentuk aspek kebebasan yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial adalah:

1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara.
2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antarmasyarakat.

3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan.
4. Terjaminnya kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, berserikat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan.
5. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat.
6. Pemenuhan hak-hak pekerja.
7. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Aspek Kesetaraan

Aspek kesetaraan mengukur sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan eksklusif dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa kebijakan, anggaran, jabatan, pelayanan, respek, dan sebagainya yang intinya memungkinkan kelompok-kelompok minoritas untuk berdaya. Indikator pembentuk aspek kesetaraan yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial adalah:

1. Kesetaraan gender
2. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan
3. Anti monopoli sumber daya ekonomi
4. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial
5. Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah
6. Akses masyarakat terhadap informasi publik
7. Kesetaraan dalam pelayanan dasar

3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, penyelenggara pemilu dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan. Indikator pembentuk aspek kapasitas lembaga demokrasi yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

1. Kinerja Lembaga Legislatif
2. Kinerja Lembaga Yudikatif
3. Netralitas Penyelenggara Pemilu
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah
5. Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat
6. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah
7. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik
8. Pendidikan politik pada kader partai politik

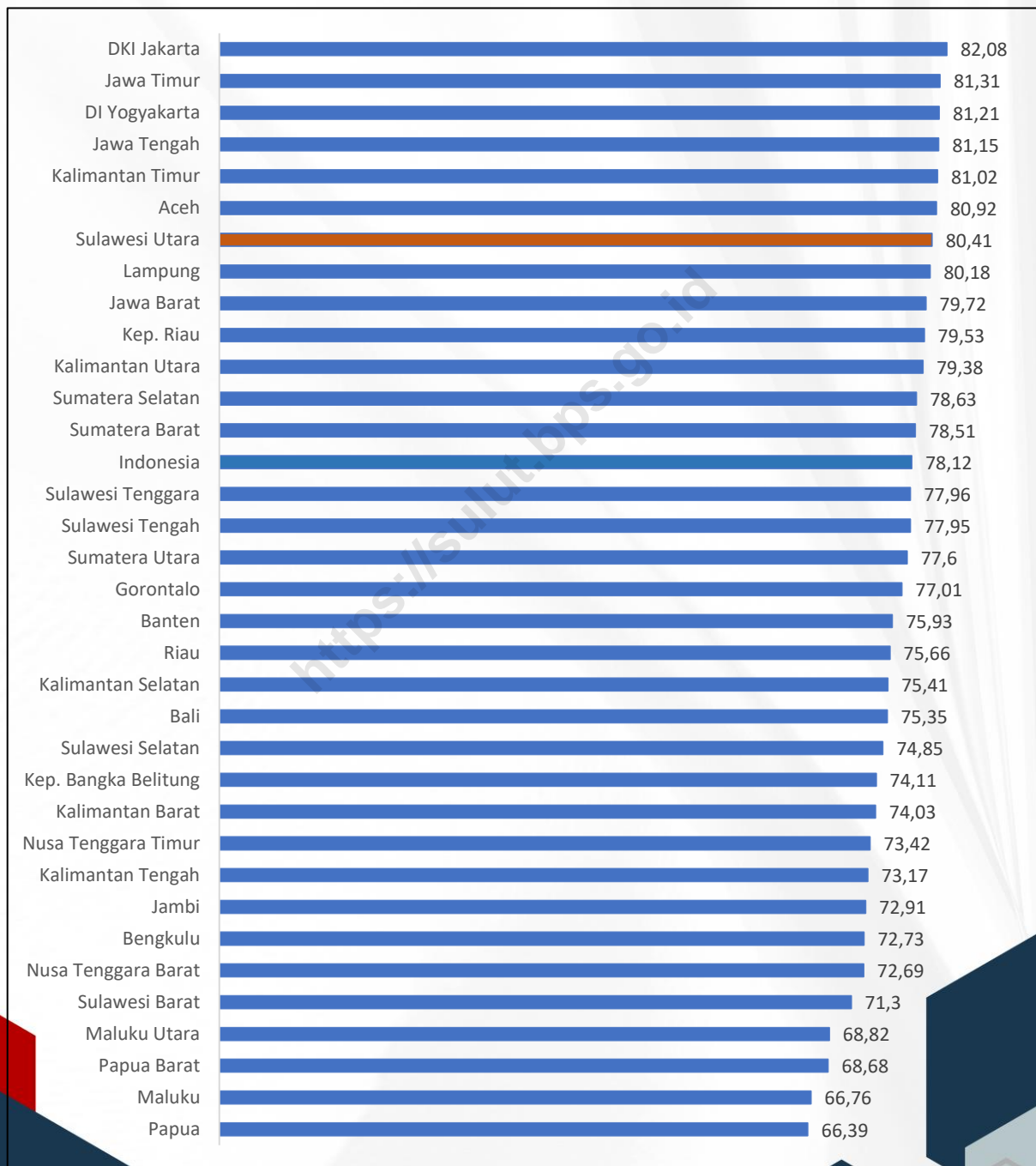
INDEKS DEMOKRASI SULAWESI UTARA TAHUN 2021

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2010 – 2014, 2015 – 2019, serta 2020– 2024. IDI merupakan kerja bersama instansi pemerintah yaitu Kemendagri, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah. Selama 12 tahun penghitungan IDI, dijumpai beberapa indikator tidak lagi relevan sehingga perlu perbaikan. Penghitungan Indeks Demokrasi pada tahun 2021 ini menggunakan metode baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, jumlah provinsi yang memiliki angka IDI berkategori “tinggi” sebanyak 8 provinsi. Dengan metode baru ini diperoleh hasil bahwa tidak ada provinsi yang masuk ke kategori “buruk” serta 26 provinsi lainnya berada pada kategori “sedang”. Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan posisi pada peringkat pertama dengan nilai IDI sebesar 82,08; diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dengan nilai IDI sebesar 81,31 serta di posisi ketiga yaitu Provinsi DI Yogyakarta sebesar 81,21. Sedangkan tiga provinsi dengan indeks demokrasi terendah antara lain Provinsi Papua sebesar 66,39, Provinsi Maluku sebesar 66,76 dan Provinsi Papua Barat sebesar 68,68.

Pada tahun 2021 Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Utara menempati urutan ke 7 di Indonesia. Di Pulau Sulawesi, Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Utara menempati urutan pertama yaitu sebesar 80,41. Hal ini menunjukkan angka Indeks Demokrasi Sulawesi Utara pada kategori “tinggi” (nilai indeks >80). Gambar 2 menunjukkan IDI Sulawesi Utara Tahun 2021 diantara provinsi-provinsi lainnya.

Gambar 2. Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi

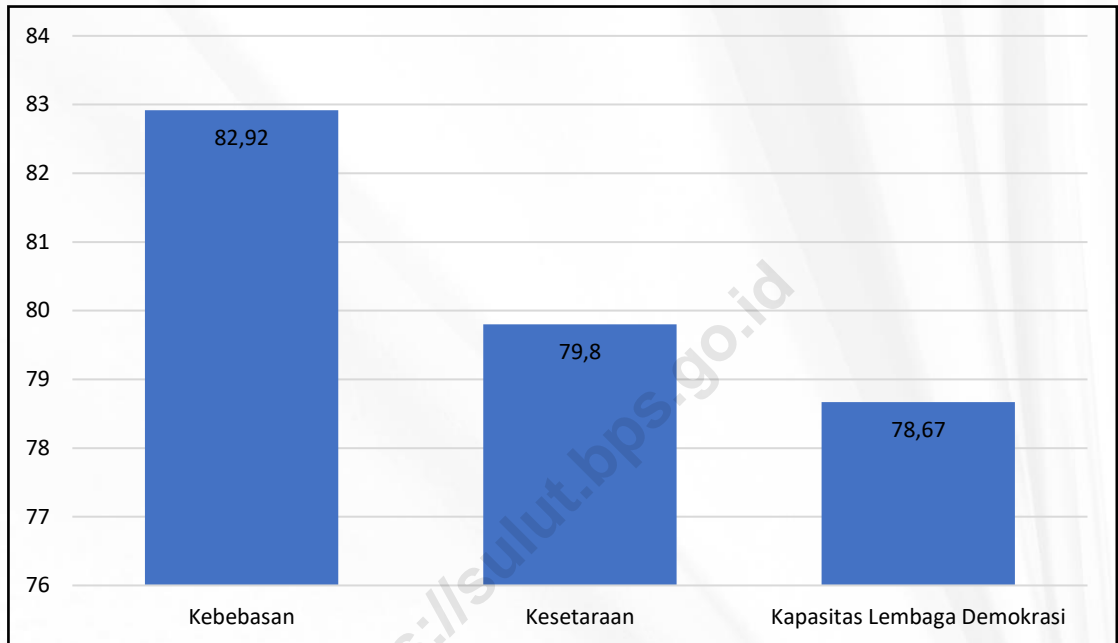


Aspek dan Indikator Indeks Demokrasi Sulawesi Utara Tahun 2021

IDI metode baru terdiri dari 3 aspek dan 22 indikator. Selain tercermin dari indeks demokrasi, tingkat demokrasi juga tercermin dari aspek dan indikator pembentuk indeks demokrasi. Aspek-aspek pada IDI tahun 2021 antara lain aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas Lembaga demokrasi. Berikut aspek indeks demokrasi di Sulawesi Utara tahun 2021 (Gambar 3).

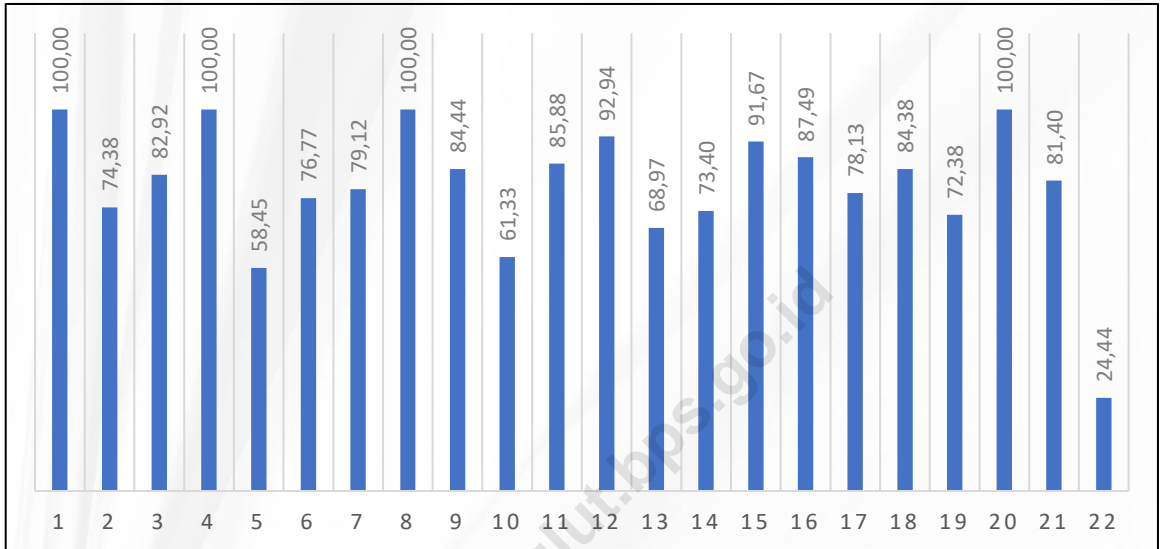
- Aspek kebebasan mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri. Aspek kebebasan Indeks Demokrasi Sulawesi Utara tahun 2021 sebesar 82,92, aspek ini berada pada kategori “tinggi”.
- Aspek kesetaraan mengukur sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan eksklusi dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Aspek kesetaraan Indeks Demokrasi Sulawesi Utara tahun 2021 sebesar 79,80, aspek ini berada pada kategori “sedang”.
- Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, penyelenggara pemilu dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan. Aspek kapasitas lembaga demokrasi Indeks Demokrasi Sulawesi Utara tahun 2021 sebesar 78,67, aspek ini berada pada kategori “sedang”.

Gambar 3. Aspek Indeks Demokrasi Sulawesi Utara Tahun 2021



Pada tahun 2021 dari 22 indikator Indeks Demokrasi Sulawesi Utara terdapat dua indikator yang memiliki skor dengan kategori “rendah” (skor < 60), delapan indikator yang memiliki skor dengan kategori “sedang” (skor 60-80) dan dua belas indikator yang memiliki skor dengan kategori “tinggi” (skor > 80). Indikator-indikator ini dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Indikator Indeks Demokrasi Sulawesi Utara Tahun 2021



Tujuh indikator berasal dari aspek Kebebasan, yaitu:

1. Indikator 1, Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara pada pemerintah provinsi per 100.000 penduduk dewasa (17+);
2. Indikator 2, Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh masyarakat per 100.000 penduduk dewasa (17+);
3. Indikator 3, Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkeyakinan per 100.000 penduduk dewasa (17+);
4. Indikator 4, Jumlah pemerintah daerah yang memiliki aturan yang melanggar kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan per jumlah pemerintah daerah;

5. Indikator 5, Kasus pelanggaran pemilu per 100.000 pemilih;
6. Indikator 6, Persentase pekerja yang memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan dana pensiun;
7. Indikator 7, Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi.

Tujuh indikator berasal dari aspek Kesetaraan, yaitu:

1. Indikator 8, Indeks pemberdayaan gender (IDG) provinsi;
2. Indikator 9, Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dll) di DPRD Provinsi yang melibatkan masyarakat terhadap total anggota DPRD Provinsi;
3. Indikator 10, Indeks Persaingan Usaha Provinsi;
4. Indikator 11, Persentase rumah tangga miskin yang menerima bantuan pada masing-masing provinsi;
5. Indikator 12, Tingkat Kesempatan Kerja Provinsi;
6. Indikator 13, Indikator Akses dan Diseminasi Informasi pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi;
7. Indikator 14, Proporsi penduduk dengan akses pada layanan dasar (air minum, sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar, APM SD – SMA) provinsi

Delapan indikator berasal dari aspek kapasitas Lembaga demokrasi, yaitu:

1. Indikator 15, Persentase Perda yang disahkan terhadap target Propemperda;
2. Indikator 16, Persentase putusan terhadap beban kasus pada pengadilan tinggi dan negeri;
3. Indikator 17, Jumlah kasus yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaraan pemilu oleh Penyelenggara pemilu dalam lingkup provinsi per kabupaten/kota;
4. Indikator 18, Kebijakan/keputusan pejabat pemda yang dinyatakan bersalah per jumlah kabupaten/kota;
5. Indikator 19, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi;
6. Indikator 20, Persentase informasi APBD yang tersedia di website Pemda berdasarkan Pasal 214 PP No 12/2019;

7. Indikator 21, Indeks Pelayanan Publik Pemda;
8. Indikator 22, Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPRD oleh kepengurusan lingkup provinsi terhadap jumlah partai politik di DPRD.

Pada tahun 2021 ini, masih terdapat 2 (lima) indikator demokrasi dengan skor berkategori “rendah” (skor < 60). Indikator-indikator ini memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik. Indikator tersebut adalah:

1. Indikator 5, Kasus pelanggaran pemilu per 100.000 pemilih
2. Indikator 22, Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPRD oleh kepengurusan lingkup provinsi terhadap jumlah partai politik di DPRD

PENUTUP

1. Pada tahun 2021 Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Utara menempati urutan ke 7 di Indonesia. Di pulau Sulawesi Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Utara menempati urutan pertama.
2. Indeks Demokrasi Sulawesi Utara sebesar 80,41. Hal ini menunjukkan angka Indeks Demokrasi Sulawesi Utara pada kategori “tinggi” (nilai indeks >80).
3. Aspek kebebasan Indeks Demokrasi Sulawesi Utara tahun 2021 sebesar 82,92, aspek ini berada pada kategori “tinggi”.
4. Aspek kesetaraan Indeks Demokrasi Sulawesi Utara tahun 2021 sebesar 79,80, aspek ini berada pada kategori “sedang”.
5. Aspek kapasitas lembaga demokrasi Indeks Demokrasi Sulawesi Utara tahun 2021 sebesar 78,67, aspek ini berada pada kategori “sedang”.
6. Pada tahun 2021 ini, masih terdapat 2 (dua) indikator demokrasi dengan skor berkategori “rendah” (skor < 60). Indikator-indikator ini memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik. Indikator tersebut adalah indikator 5 (aspek kebebasan), dan indikator 22 (aspek kapasitas Lembaga demokrasi).

LAMPIRAN

<https://www.bps.go.id>

TABEL 1
DAFTAR INDIKATOR

	INDIKATOR	DATA/INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	SUMBER
1.	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara (Dimensi Politik)	<p>Provinsi: Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara pada pemerintah provinsi per 100.000 penduduk dewasa (17+)</p> <p>Pusat: Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara pada pemerintah pusat per K/L</p>	<p>Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Kabar • FGD • Portal Berita Online • Komnas HAM <p>Pusat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Kabar • FGD • Portal Berita Online Komnas HAM
2.	Terjaminnya kebebasan berkumpul berekspresi, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat (Dimensi Politik)	<p>Provinsi: Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh masyarakat per 100.000 penduduk dewasa (17+)</p> <p>Pusat: Tidak ada</p>	<p>Provinsi:</p> <p>Surat Kabar Portal Berita Online Komnas HAM</p>
3.	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan (Dimensi Sosial)	<p>Provinsi: Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkeyakinan per 100.000 penduduk dewasa (17+)</p> <p>Pusat: Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkeyakinan per jumlah K/L</p>	<p>Provinsi:</p> <p>Surat Kabar FGD Portal Berita Online Komnas HAM</p> <p>Pusat:</p> <p>Surat Kabar FGD Portal Berita Online Komnas HAM</p>

	INDIKATOR	DATA/INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	SUMBER
4.	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, Berpendapat, dan Berkeyakinan Dalam Setiap Kebijakan (Dimensi Politik)	Provinsi: Jumlah pemerintah daerah yang memiliki aturan yang melanggar kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan per jumlah pemerintah daerah Pusat: Jumlah UU yang dikaji komnas HAM per jumlah K/L	Provinsi: Peraturan Pemerintah Daerah Pusat: Komnas HAM
5.	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat (Dimensi Politik)	Provinsi: Kasus pelanggaran pemilu per 100.000 pemilih Pusat: Tidak Ada	Provinsi: Badan Pengawas Pemilu RI Pusat: Badan Pengawas Pemilu RI
6.	Pemenuhan hak-hak pekerja (Dimensi Ekonomi)	Provinsi: Persentase Pekerja yang memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian. Pusat: Tidak ada	Provinsi: Sakernas BPS Pusat: Tidak ada
7.	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Dimensi Politik, Ekonomi, dan Sosial)	Provinsi: Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Pusat: Tidak ada	Provinsi: Dewan Pers Pusat: Tidak ada
8.	Kesetaraan gender (Dimensi Politik, Ekonomi, dan Sosial)	Provinsi: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Pusat: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional	Provinsi: Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat: Badan Pusat Statistik (BPS)
9.	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan. (Dimensi Politik)	Provinsi: Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dll) di DPRD Provinsi terhadap total anggota DPRD Pusat: Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum	Provinsi: Sekretariat DPRD Pusat: Sekretariat DPR dan DPD

	INDIKATOR	DATA/INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	SUMBER
		DPR dan DPD (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dll) yang melibatkan masyarakat, terhadap total anggota MPR	
10.	Antimonopoli sumber daya ekonomi (Dimensi Ekonomi)	Provinsi: Indeks Persaingan Usaha Provinsi Pusat: Tidak Ada	Provinsi: KPPU Pusat: Tidak Adak
11.	Akses warga miskin pada perlindungan dan Jaminan sosial (Dimensi Ekonomi)	Provinsi: Persentase rumahtangga miskin yang tidak menerima bantuan sama sekali pada masing-masing provinsi Pusat: Tidak ada	Provinsi: Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat: Tidak ada
12.	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah (Dimensi Ekonomi)	Provinsi: Tingkat Kesempatan Kerja Provinsi Pusat: Tidak ada	Provinsi: Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat: Tidak ada
13.	Akses Masyarakat terhadap Informasi Publik (Dimensi Politik)	Provinsi: Indikator Akses dan Diseminasi Informasi pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Pusat: Tidak ada	Provinsi: Komisi Informasi Pusat Pusat: Tidak ada
14.	Kesetaraan dalam pelayanan dasar (Dimensi Sosial)	Provinsi: Proporsi penduduk dengan akses pada layanan dasar provinsi Pusat: Tidak Adak	Provinsi: Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat: Tidak Ada
15.	Kinerja Lembaga legislatif (Dimensi Politik)	Provinsi: Persentase Perda yang disahkan terhadap target Propemperda Pusat: Persentase UU yang disahkan terhadap target Prolegnas Prioritas Tahunan	Provinsi: Sekretariat DPRD Provinsi Pusat: Sekretariat DPR dan DPD
16.	Kinerja lembaga yudikatif (Dimensi Politik)	Provinsi: Persentase putusan terhadap beban kasus pada pengadilan tinggi dan negeri Pusat: Persentase putusan terhadap beban kasus di MA dan MK	Mahkamah Agung Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

	INDIKATOR	DATA/INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	SUMBER
17.	Netralitas Penyelenggara Pemilu (Dimensi Politik)	Provinsi: Jumlah kasus yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaraan pemilu oleh Penyelenggara pemilu dalam lingkup provinsi per kabupaten/kota Pusat: Jumlah putusan terkait keberpihakan penyelenggara pemilu per jumlah anggota penyelenggara pemilu	Bawaslu DKPP
18.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah (Dimensi Politik)	Provinsi: Kebijakan/keputusan pejabat pemda yang dinyatakan bersalah perjumlah kabupaten/kota Pusat: Kebijakan/keputusan pejabat pemerintah pusat yang dinyatakan bersalah perjumlah K/L	PTUN PTUN
19.	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat (Dimensi Politik dan Sosial)	Provinsi: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Pusat: Tidak ada	KLHK
20.	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah (Dimensi Politik)	Provinsi: Persentase informasi APBD yang tersedia di website Pemda berdasarkan Pasal 214 PP No 12/2019 Pusat: Informasi APBN yang tersedia di Kemenkeu	Pemerintah daerah; Kemenkeu
21.	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik (Dimensi Politik)	Provinsi: Indeks Pelayanan Publik Pemda Nasional; Pusat: Indeks Pelayanan Publik K/L	Kemenpan RB Kemenpan RB

	INDIKATOR	DATA/INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	SUMBER
22.	Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Dimensi Politik)	Provinsi: Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPRD oleh kepengurusan lingkup provinsi terhadap jumlah partai politik di DPRD Pusat: Tidak ada	Partai Politik Bakesbangpol

<https://sulut.bps.go.id>

TABEL 2
SKOR INDIKATOR IDI PROVINSI SULAWESI UTARA

Deskripsi		Capaian	Kategori
IDI Komposit		80,41	TINGGI
Aspek 1	Kebebasan	82,92	TINGGI
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	100,00	-
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	74,38	-
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	82,92	-
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	100,00	-
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	58,45	-
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	76,77	-
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	79,12	-
Aspek 2	Kesetaraan	79,80	SEDANG
8	Kesetaraan Gender	100,00	-
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	84,44	-
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	61,33	-
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	85,88	-
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	92,94	-
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	68,97	-
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	73,40	-
Aspek 3	Kapasitas Lembaga Demokrasi	78,67	SEDANG
15	Kinerja Lembaga Legislatif	91,67	-

	Deskripsi	Capaian	Kategori
Aspek 3	Kapasitas Lembaga Demokrasi	78,67	SEDANG
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	87,49	-
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	78,13	-
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	84,38	-
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	72,38	-
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100,00	-
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	81,40	-
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	24,44	-



D A T A
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**
Jl. 17 Agustus Manado, 95119
Telp: (0431)847044, Email: bps7100@bps.go.id
Website: <https://sulut.bps.go.id>